

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penyelenggaraan Program Rumah Padat Karya Pitstop sebagai upaya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya Tahun 2024–2025 tidak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh lemahnya tata kelola pemberdayaan dan keberlanjutan program. Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas, pelatihan, dukungan CSR, dan kemitraan dengan berbagai pihak, namun dukungan tersebut belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan. Akibatnya, hanya Pitstop Manyar yang masih beroperasi, sedangkan Pitstop Lidah Kulon dan Sukomanunggal telah berhenti beroperasi, serta Pitstop Penjaringansari mengalami penurunan aktivitas.

- 1) Pada aspek pemungkinan (*enabling*), program telah menyediakan akses pekerjaan dan wadah usaha, tetapi belum mampu menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Rendahnya minat masyarakat dan tidak optimalnya dukungan ekosistem pelanggan menyebabkan peluang kerja yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal.
- 2) Pada aspek penguatan (*empowering*), program belum berhasil membentuk kemandirian peserta sebagai pelaku usaha. Pelatihan yang terbatas, mental kewirausahaan yang belum kuat, serta pendampingan yang belum merata menyebabkan peserta belum mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

- 3) Pada aspek perlindungan (*protecting*), lemahnya monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya peran OPD pengampu, serta tidak adanya mekanisme mitigasi saat usaha mengalami penurunan menyebabkan keberlangsungan operasional Pitstop tidak dapat terjaga dengan baik.
- 4) Pada aspek pendukung (*supporting*), berbagai dukungan yang tersedia belum terintegrasi dalam strategi pengembangan usaha dan pasar. Promosi yang terbatas, kelembagaan pengelola yang kurang efektif, serta dukungan CSR yang lebih berorientasi pada bantuan sarana menyebabkan usaha Pitstop belum mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hambatan utama Program Rumah Padat Karya Pitstop terletak pada belum terbentuknya tata kelola pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, dan pendukung secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan program sebagai instrumen penyerapan tenaga kerja belum dapat tercapai secara optimal.

4.2 Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya perlu mengubah orientasi Program Rumah Padat Karya Pitstop dari sekadar pembentukan unit usaha menjadi penguatan keberlanjutan usaha. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-launching, memastikan adanya pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta membangun strategi

pengembangan pasar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing lokasi Pitstop.

2) Bagi OPD dan Stakeholder Pelaksana

Diperlukan penguatan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam Program Pitstop agar pelaksanaan program tidak berhenti pada penyediaan fasilitas dan tenaga kerja, tetapi juga mencakup pembinaan usaha, pengembangan jejaring kemitraan, dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha. Dengan demikian, fungsi Program Pitstop sebagai instrumen penyerapan tenaga kerja dapat berjalan secara lebih berkelanjutan.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji Program Rumah Padat Karya Pitstop dari perspektif tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) atau keberlanjutan kebijakan (*policy sustainability*) untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan program padat karya berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.

Keberhasilan program penyerapan tenaga kerja tidak cukup diukur dari jumlah usaha yang berhasil dibentuk, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga keberlangsungan usaha tersebut sehingga tetap mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dalam jangka panjang.